

**PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN MELALUI SISTEM APLIKASI  
PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MAGFIRAH NUR AMALIA  
NPP. 29.1391

*Asdaf Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email :  
[magfirah.amelia2000@gmail.com](mailto:magfirah.amelia2000@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *(Contains the background behind the research). In this day and age, we live in an area of increasingly sophisticated technology, even all government affairs can be done and solved with Information Technology. Government archives are one of the government's affairs that must be preserved. South Sulawesi Province is one of the Soppeng Regency Blood Governments that manages archives through Information Technology, namely the Personnel Service Application System (SAPK). With the Personnel Service Application System, employees can store data and update it accurately. However, the problem is that there are still many employees who are not aware and do not understand about updating their own data.*

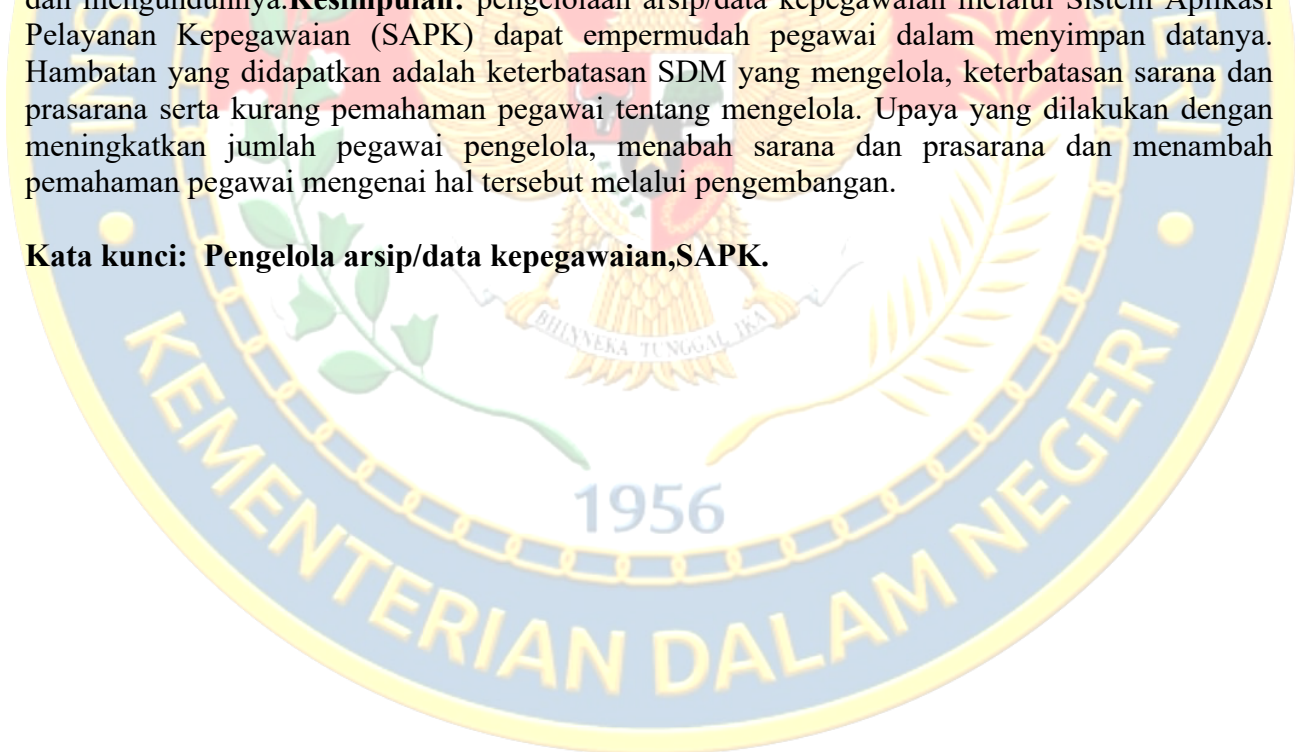
**Objective:** *To find out the suitability of the implementation of personnel archive management through the personnel service application system (SAPK) at the Agency for Personnel and Human Resources Development, Soppeng Regency, South Sulawesi Province.*  
**Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation*  
**Result** *The Management of Personnel Archives through the Personnel Service Application System has been running quite well at the BKPSDM of Soppeng Regency. Before there was an application for the Personnel Service Application System (SAPK), employees had difficulty finding files. Meanwhile, employee files are often lost, either because they are lost, scattered, or burned. However, with SAPK, employees can easily find archives/personal data anywhere and download them.*  
**Conclusion:** *management of employee records/data through the Personnel Service Application System (SAPK) can make it easier for employees to store their data. Obstacles obtained are limited human resources to manage, limited facilities and infrastructure and lack of understanding of employees about managing. Efforts are made by increasing the number of management employees, adding facilities and infrastructure and increasing employee understanding about this through development.*

**Keywords:** Records/Employment Data Manager, SAPK.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pada zaman sekarang ini, kita tinggal di area teknologi yang semakin canggih bahkan segala urusan pemerintah dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan Teknologi Informasi. Arsip pemerintah adalah salah satu urusan pemerintah yang harus dilestarikan keberadaannya. Provinsi Sulawesi Selatan salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang mengelola arsip melalui Teknologi Informasi yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain (SAPK). Dengan adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawai pegawai dapat menyimpan data serta memperbaruinya secara akurat. Namun, masalah yang terdapat adalah masih banyak pegawai yang kurang sadar dan belum paham tentang memperbaharui data sendiri. **Tujuan** Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pengelolaan Arsip Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sudah berjalan cukup baik di BKPSDM Kabupaten Soppeng. Sebelum ada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pegawai kesulitan mencari berkas. Sedangkan, berkas pegawai rentang hilang baik itu karena hilang, tercecer, atau terbakar. Namun, dengan adanya SAPK, pegawai mudah mencari arsip/data pribadi dimanapun dan mengunduhnya. **Kesimpulan:** pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dapat mempermudah pegawai dalam menyimpan datanya. Hambatan yang didapatkan adalah keterbatasan SDM yang mengelola, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurang pemahaman pegawai tentang mengelola. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah pegawai pengelola, menabuh sarana dan prasarana dan menambah pemahaman pegawai mengenai hal tersebut melalui pengembangan.

**Kata kunci:** Pengelola arsip/data kepegawaian,SAPK.



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemajuan Teknologi Informasi yang begitu pesat mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik dalam lapisan individu maupun organisasi, yang memiliki kemajuan untuk menggunakannya. Bagi pelaku pelayanan publik yang mengelola bagian pemerintahan baik itu administrasi, pelayanan, maupun dalam pengelolaan data kepegawaian sistem informasi tentunya semakin terbantu dengan berkembangnya teknologi informasi. Dalam setiap instansi atau organisasi dapat menggunakan internet dan jaringan teknologi informasi dalam menjalankan suatu kegiatan secara elektronik atau bertransaksi secara online. Sistem informasi yang berbasis teknologi dalam manajemen kepegawaian merupakan hal yang harus tetap dilanjutkan pemerintah dalam membangun lingkungan pemerintahan dalam menghadapi era globalisasi. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-Government nasional untuk mengatur tata kelola dan peningkatan pelayanan yang baik diperlukan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan strategi dalam pengembangan E-Government. E-Government adalah salah satu jenis pelaksanaan administrasi publik yang mengingat inovasi data dan sebagai sarana untuk komunikasi antara pemerintah baik dari kalangan kelompok masyarakat, kalangan pebisnis, maupun sesama instansi pemerintahan. Demi mewujudkan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien di lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng maka diterapkannya E-Government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam mengelola data atau arsip kepegawaian menggunakan aplikasi berbasis online yang telah terhubung secara online oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) memiliki beberapa peran penting dalam mengurus data kepegawaian, diantaranya penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), pencetakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemberian nota persetujuan atas kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat pemberhentian berupa hak pensiun. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh pegawai dan diakses melalui alamat website dengan akses utamanya yang dapat dibuka oleh admin instansi yaitu <https://ncsisadmin.co.go.id/> untuk mengelola data kepegawaian seperti menambahkan data, pengadaan ASN secara kolektif, dan tempat memberikan peran kepada ASN untuk menjadi operator di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng sebelumnya dalam pelayanan kepegawaian dilakukan secara manual. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng beberapa masalah yang dialami pengelolaan arsip kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yaitu pertama belum maksimalnya pegawai dalam penggunaan sistem aplikasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengimputan data oleh pegawai serta output dalam hal penyajian data atau informasi. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) telah diterapkan pada BKPSDM Kabupaten Soppeng dalam hal meningkatkan kinerja pegawai dengan mengakses serta mengelola data dan informasi kepegawaian belum bisa dikatakan penggunaannya sudah efektif karena terdapat beberapa masalah baik yang mengelola data ataupun data yang dikelola. Maka dari itu, keterampilan dan kemampuan pegawai dalam hal mengelola data dan mengurus data melalui SAPK sangat diperlukan secara efektif agar data yang dikelola dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian dengan merumuskan judul **“PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN**

# **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN.”**

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada zaman sekarang ini, kita tinggal di area teknologi yang semakin canggih bahkan segala urusan pemerintah dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan Teknologi Informasi. Arsip pemerintah adalah salah satu urusan pemerintah yang harus dilestarikan keberadaannya. Provinsi Sulawesi Selatan salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang mengelola arsip melalui Teknologi Informasi yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain (SAPK). Dengan adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain pegawai dapat menyimpan data serta memperbaruinya secara akurat. Namun, masalah yang terdapat adalah masih banyak pegawai yang kurang sadar dan belum paham tentang memperbaharui data sendiri.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Tri Wahyuni dan Durinta Puspasari (2015), berjudul “Efektivitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Sebagai Kelancaran Penanganan Usulan Berkas Masuk Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya Jawa Timur. ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).Kedua, Siti Chaerunnisa Tasya (2017), berjudul “ Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bant ” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Ketiga, Wasiah Sufi dan Dwi Herlinda (2018), berjudul “Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru ” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; Untuk mengetahui kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng dalam menangani permasalahan tersebut.

## **II. METODE**

Sugiyono (2016: 232) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian bahwa “metode penelitian kualitatif pemerintahan, data didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan dimantapkan dengan triangulasi.”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan**

Pengelolaan Arsip Kepegawaian yang mana dalam penelitian ini akan mendeskripsikan proses arsip/data kepegawaian yang akan dikelola melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang mana berjalan dengan baik atau kurang baik. Penginputan merupakan suatu proses mengumpulkan data pegawai yang siap diolah menjadi arsip dalam bentuk elektronik. Analisis mengenai pengelolaan arsip/data kepegawaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dirumuskan oleh George R Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Apabila dijabarkan sebagaimana berikut.

#### **1. Perencanaan**

Dalam pengelolaan arsip/data kepegawaian tentunya membutuhkan sebuah perencanaan terlebih dahulu yang manamenetapkan pelaksanaan kerja pegawai dalam mengelola data kepegawaian melalui sistem elektronik yaitu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. pengelolaan arsip kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng sudah berjalan sesuai rencana. Namun demikian SDM pengelola SAPK belum sepenuhnya memiliki kompetensi jabatan yang sesuai dengan tu

#### **2. Pengorganisasian**

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ini merupakan aplikasi database kepegawaian yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara yang mana BKN memberikan kewenangan kepada seluruh instansi pemerintahan dalam hal ini mencakup instansi pusat, instansi provinsi, dan instansi pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola database kepegawaian pada instansinya masing-masing. Dalam hal ini untuk pengelolaan arsip/data kepegawaian terdapat pembagian kerja dalam mengelola data kepegawaian sesuai dengan tugas atau tupoksi masing-masing. dalam pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui SAPK sudah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam bidangnya yang mana akan disatukan dan diserahkan kepada sub bagian informasi kepegawaian.

#### **3. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pengelolaan arsip/data kepegawaian itu bekerja sesuai prosedur atau SOP. Prosedur adalah ketentuan- ketentuan yang harus dilakukan juga berisi langkah-langkah dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui SAPK dilakukan 2 koordinasi, yaitu koordinasi secara horizontal dan koordinasi vertikal. Sebelum adanya SAPK, sistem pendataan pegawai dilakukan secara manual dengan banyaknya buku-buku dan dokumen yang menumpuk, pendataan dan akurasi informasi pegawai susah di dicari, banyak nya buku-buku pendataan sering membuat pegawai susah dalam mencari data pegawai yang di

butuhkan. dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui SAPK pegawai merasa terbantu.

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan yang diterapkan dalam kegiatan pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui SAPK diawasi oleh pegawai itu sendiri yang bersangkutan, petugas atau pengelola SAPK, Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng dan BKN Kantor Regional Makassar. pengawasan dalam pengelolaan arsip/data kepegawaian bukan hanya dari pimpinan tertinggi, namun pegawai itu sendiri juga berperan penting dalam pengawasan karena pegawai yang akan memperbaharui datanya sendiri.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng**

#### **1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Hambatan dalam pengelolaan arsip/data kepegawaian yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia di BKPSDM Kabupaten Soppeng yang mengelola sistem ini. Jumlah Sumber Daya Manusia berpengaruh pada kelancaran dari My-SAPK ini. belum memadainya jumlah sumber daya manusia pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

#### **2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang pengelolaan**

Hambatan yang terjadi pada pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui SAPK yaitu sumber daya teknologi yang belum memadai. Salah satu penunjang dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini adalah sarana yang digunakan, apakah sarana yang digunakan ini memadai atau tidak dan bagaimana dalam menggunakan atau mengaksesnya. yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian salah satunya adalah sumber daya teknologi baik dari segi perangkat maupun dari jaringan yang belum memadai. Terbatasnya jumlah perangkat di BKPSDM Kabupaten Soppeng yang digunakan untuk mengelola data pegawai akan menyebabkan adanya hambatan dalam pengelolan data pegawai. Selain itu dari pegawai yang menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ini masih banyak yang belum paham bagaimana cara mengakses aplikasi tersebut, bagaimana cara mengupload data dan sebagainya.

#### **3. Keterbatasan Akses**

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian adalah salah satunya kurangnya kesadaran pegawai dalam memperbaharui kembali data-data pribadinya. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian adalah salah satunya kurangnya kesadaran pegawai dalam memperbaharui kembali data-data pribadinya. Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini untuk pelayanan administrasi jauh lebih mudah terutama pada pengelolaan data kepegawaian. Adapun data pegawai yang tidak terdaftar sebagai PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dikarenakan terdapat selisih data kepegawaian antara Aplikasi SAPK BKN dan Simpeg Lingkup Kabupaten Soppeng akibat dari kelalaian data yang tidak diperbaharui oleh pegawai itu sendiri. salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan data kepegawaian adalah rendahnya kesadaran seorang pegawai dalam mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi terutama bagi pegawai yang berumur, banyaknya pegawai yang tidak disiplin dalam menggunakan sistem aplikasi ini dibuktikan dengan masih banyaknya pegawai yang belum meng-update data. Dalam hal ini pegawai yang bersikap cuek terhadap penggunaan sistem

ini dapat menghambat pengelolaan arsip/data kepegawaian. Oleh karena itu, dengan bersikap cueknya seorang pegawai terhadap updating data berdampak pada pengelolaan arsip/data kepegawaian.

#### **4. Kurangnya sosialisasi mengenai SAPK**

Penghambat pelaksanaan pengelolaan arsip/data kepegawaian adalah kurangnya sosialisasi pemahaman mengenai aplikasi SAPK ini. Seperti yang diketahui pegawai dituntut untuk paham akan penggunaan SAPK karena setiap pegawai akan selalu memperbaharui data-datanya betapa pentingnya pemahaman pegawai dengan diadakannya sosialisasi mengenai sistem aplikasi pelayanan kepegawaian untuk mengelola arsip/data kepegawaian.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Tri Wahyuni dan Durinta Puspasari (2015), berjudul “Efektivitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Sebagai Kelancaran Penanganan Usulan Berkas Masuk Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya Jawa Timur. ”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Siti Chaerunnisa Tasya (2017), berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bant ”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni menunjukkan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berjalan dengan baik. Wasiah Sufi dan Dwi Herlinda (2018), berjudul “Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru ”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online. Pembaharuan temuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni pengelolaan arsip/data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dapat mempermudah pegawai dalam menyimpan datanya. Hambatan yang didapatkan adalah keterbatasan SDM yang mengelola, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurang pemahaman pegawai tentang mengelola. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah pegawai pengelola, menabuh sarana dan prasarana dan menambah pemahaman pegawai mengenai hal tersebut melalui pengembangan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: Pengelolaan Arsip Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sudah berjalan cukup baik di BKPSDM Kabupaten Soppeng. Sebelum ada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pegawai kesulitan mencari berkas. Sedangkan, berkas pegawai rentang hilang baik itu karena hilang, tercecer, atau terbakar. Namun, dengan adanya SAPK, pegawai mudah mencari arsip/data pribadi dimanapun dan mengunduhnya; Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan SAPK di BKPSDM Kabupaten Soppeng yang meliputi : Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang bisa dibilang kurang memadai karena masih kurang pegawai dalam mengelola. Dalam hal ini kompetensi pegawai dan keahlian beberapa pegawai dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan SAPK; Keterbatasan Sarana dan prasarana yang masih belum merata yang banyak terdapat pada user SAPK yang kondisi jauh dari jaringan yang dan pengadaan perangkat. ; Keterbatasan Akses Masih adanya hambatan seperti kurangnya kesadaran pegawai dalam memperbaharui datanya dan masih banyak pegawai yang belum paham mengenai Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ini; Kurangnya Sosialisasi mengenai Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pentingnya pemahaman pegawai dengan diadakannya sosialisasi mengenai sistem aplikasi pelayanan

kepegawaian untuk mengelola arsip/data kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Sistem Aplikasi di BKPSDM Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut : Berusaha Mempersiapkan SDM sebagai Operator atau admin terbaik; Melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap penunjang penggunaan SAPK yang telah i memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai SAPK; Mengadakan Sosialisasi, koordinasi dan pelatihan secara rutin berbasis teknologi guna meningkatkan kompetensi pegawai. Dalam hal ini berguna untuk pengelolaan arsip/data kepegawaian. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George R Terry. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Dengan pengelolaan Sistem Aplikasi di BKPSDM Kabupaten Soppeng untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng. serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiarto, Agus dan Wahyono, Teguh 2015. Manajemen Kearsipan Modern dan distribusinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikanto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, Sri. (2008). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi vetakan ke tiga belas). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moenir. (2010). Manajemem Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akutansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.